

## **BAB II**

### ***SEX TRAFFICKING DAN YAKUZA***

Jepang merupakan negara destinasi utama dalam fenomena *Sex Trafficking*. Tidak hanya perempuan dari negara-negara Asia saja yang menjadi korban dari *Sex Trafficking* dengan tujuan utama Jepang, tetapi juga perempuan yang berasal dari negara-negara Amerika Latin dan Eropa seringkali menjadi korban. Pemerintah Jepang berulang kali mendapat skor yang tidak baik dari masyarakat internasional terkait penanganan *Human Sexual Trafficking*. Hal ini dikarenakan aktivitas ini hampir seluruhnya dikuasai oleh Yakuza, *organized crime* di Jepang yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi pelaku utama dari bisnis *Sex Trafficking* ini serta sejarah Jepang sendiri terkait fenomena prostitusi di negaranya. Alhasil, *Sex Trafficking* di Jepang pun menjadi fenomena yang sangat sulit diberantas oleh Jepang.

#### **2.1 Jepang dan *Sex Trafficking***

Maria Loaiza, seorang penari profesional di Kolombia, menjadi korban *Sex Trafficking* yang dilakukan oleh Kelompok Kejahatan Terorganisir. Saat itu, Loaiza berumur 21 tahun, dan bekerja sebagai penari profesional di salah satu klub di Kolombia. Loaiza menerima tawaran dari seseorang yang mengaku sebagai agen dari pencari bakat dan menawarkan Loaiza untuk merintis karir di Jepang. Karena saat itu ia terhimpit keadaan, maka Loaiza menerima tawaran

tersebut. Loaiza terbang ke Jepang untuk mencari nafkah sebagai penari profesional seperti yang agen itu katakan. Namun, sesampainya di sana, ia diberondol oleh tiga orang pria, yang belakangan diketahui olehnya sebagai anggota Yakuza, yang langsung mengambil paspornya dan mengatakan Loaiza berhutang sebanyak 50.000 dollar AS dan harus membayar hutang tersebut jika ingin bebas (trust.org, 2014).

Loaiza dipaksa untuk menjadi prostitusi di Jepang dan dia bekerja selama seminggu penuh tanpa istirahat. Dia berpindah pindah tempat selama 10-12 hari sekali dan diawasi oleh para mafia tersebut. Ia tinggal di sebuah ruangan berukuran sedang yang ditempati oleh 7 wanita lainnya yang berasal dari Filipina, Korea Selatan, Rusia, Cina, Venezuela, Peru, dan wanita Jepang sendiri. Mereka semua mengalami hal yang sama dengan Loaiza. Kemudian, Loaiza berusaha untuk kabur yang akhirnya membawa dirinya ke Kedutaan Besar Kolombia di Jepang dan baru mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban *Human Trafficking* (trust.org, 2014).

Peristiwa tersebut pada dasarnya merupakan hal yang sudah banyak terjadi di Jepang. Jepang, menurut laporan dari Departemen Negara Amerika Serikat (*Department of State*), adalah negara tujuan, sumber, dan transit bagi pria, wanita, dan anak-anak yang mengalami *Human Trafficking*, utamanya kerja paksa dan perdagangan seks. Pekerja migran laki-laki dan perempuan, terutama dari Asia, mengalami kerja paksa, termasuk melalui pemerintah

*Industrial Trainee and Technical Internship Program* (TITP). Beberapa pria, wanita, dan anak-anak dari Asia Timur, Asia Tenggara (terutama Filipina dan Thailand), Amerika Selatan, Afrika, Eropa Timur, Rusia, dan Amerika Tengah pergi ke Jepang untuk dipekerjakan atau melakukan dan perdagangan seks. *Traffickers* juga menggunakan *fraud marriage*<sup>1</sup> antara perempuan asing dan pria Jepang untuk memfasilitasi masuknya perempuan ke Jepang untuk melakukan prostitusi di bar, klub, pelacuran, dan panti pijat. *Traffickers* secara ketat mengontrol pergerakan korban menggunakan jeratan utang, ancaman kekerasan, deportasi, pemerasan, dan metode psikologis pemaksaan lainnya. Korban prostitusi terkadang menghadapi utang pada saat dimulainya kontrak mereka. Kebanyakan diminta untuk membayar biaya majikan untuk biaya hidup, perawatan medis, dan keperluan lainnya, membuat mereka sebagian besar berada dalam jeratan hutang. Proses operasi prostitusi yang digunakan untuk menghitung utang ini biasanya tidak transparan (Humantrafficking.org, 2015).

Tidak hanya perempuan asing, warga Jepang, terutama gadis remaja pelarian dan anak-anak di bawah umur juga terlibat perdagangan seks. Fenomena *kosai enjo*, atau yang juga dikenal sebagai "kencan yang berkompensasi" dan *joshi-kosei* atau gadis SMA terus menjadi pendukung

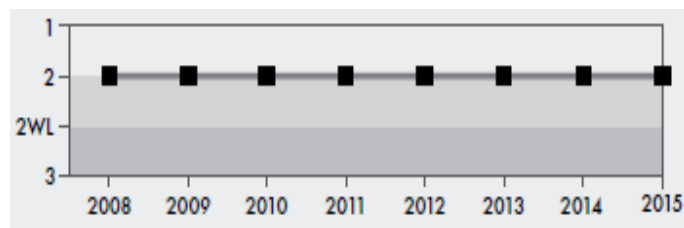
---

<sup>1</sup> *Fraud Marriage*, pernikahan yang diinisiasi oleh *Trafficker* yang di mana terdapat laki-laki atau perempuan asing yang dinikahkan dengan warga asli Jepang demi mendapatkan izin untuk masuk ke Jepang.

tingginya tingkat pelacuran anak-anak di Jepang. Jaringan prostitusi yang terorganisir menargetkan wanita Jepang yang rentan dan anak perempuan yang berada dalam kemiskinan atau cacat mental dan intelektual, yang berada tempat umum seperti kereta api bawah tanah, tempat kumpul yang populer, sekolah, dan juga menggunakan metode online; beberapa perempuan dan anak perempuan menjadi korban *trafficking*.

Pemerintah Jepang tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum dalam upaya penghapusan *Human Trafficking*; Namun, Jepang membuat upaya yang signifikan untuk melaksanakannya. Pemerintah tidak mengembangkan langkah-langkah perlindungan dan bantuan khusus untuk korban perdagangan manusia, seperti mendirikan jaringan nasional untuk tempat penampungan khusus korban *trafficking*, terpisah dari jaringan yang sudah ada yaitu penampungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. (Humantrafficking.org, 2015).

Grafik 2.1 Peringkat Tier Jepang dari tahun 2008-2015



Sumber: *Trafficking in Persons Report Department of State United States of America*, 2015.

Jepang sendiri sudah masuk dalam negara yang diperingatkan oleh masyarakat internasional akan tingginya tingkat perdagangan manusia di

negaranya, khususnya yang bertujuan untuk komersialisasi seks seperti prostitusi dan *sex tourism*. Pada grafik 2.1 dijelaskan bahwa Jepang, selama kurun waktu 7 tahun yaitu dari tahun 2008 hingga tahun 2015, selalu berada dalam kategori Tier 2, yang di mana telah dijelaskan sebelumnya merupakan negara yang tidak memenuhi standar minimum dalam upaya penghapusan perdagangan manusia dan bahkan Jepang sebelumnya dibubuhi predikat *Watch List*, yaitu negara yang diawasi oleh organisasi internasional seperti PBB dan banyak organisasi lainnya yang perhatian dengan isu *Human Trafficking* ini khususnya dalam kasus *Sex Trafficking* (Humantrafficking.org, 2015).

*Sex Trafficking* di Jepang pun tidak bisa terlepas dari sejarah keberadaan “*Comfort Women*” pada masa imperialisme Jepang dahulu kala. Saat itu para tentara Jepang sedang menjalani perang dengan banyak negara sebagai bentuk imperialisme mereka. Mereka ditempatkan di berbagai negara di Asia seperti Korea Selatan, China, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bagi sebagian tentara Jepang saat itu, seks adalah sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi. Seks, bagi tentara Jepang sudah seperti makanan atau amunisi mereka sebelum berperang. Mereka percaya dengan melakukan seks sebelum memulai perang akan meningkatkan kemampuan mereka dalam medan perang serta akan melindungi mereka dari malapetaka. Namun dengan kondisi mereka yang jauh dari rumah dan istri mereka, kebutuhan mereka akan seks pun tidak bisa terpenuhi. Saat itu, dengan tidak terpenuhinya kebutuhan akan seks menjadi

suatu tekanan bagi tentara Jepang. Belum lagi dengan adanya tekanan dari komandan-komandan mereka, dan sedikitnya waktu mereka untuk berlibur semakin membuat mereka dalam tekanan yang sangat besar. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak tentara Jepang yang memilih untuk mengunjungi tempat pelacuran, bahkan ada beberapa tentara Jepang yang mengambil jalan keji dengan memperkosa wanita wanita yang mereka temukan di daerah jajahan mereka. Akibatnya, banyak tentara Jepang yang tertular penyakit dan secara langsung mempengaruhi perform mereka di medan perang (Lee, 2003: 511).

Gambar 2.1 *Comfort Women* yang berada di Kamp Militer Jepang



Sumber: Huffingtonpost.com, 2016

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Jepang akhirnya membangun *Comfort Station*, yaitu sebuah tempat yang dihuni oleh para *Comfort Women* yang dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual tentara-tentara Jepang.

*Comfort Women* biasanya merupakan perempuan berumur 14 sampai 18 tahun. Mereka umumnya merupakan perempuan yang tidak berpendidikan serta berasal dari keluarga miskin dari daerah perkotaan. Delapan puluh persen dari mereka adalah perempuan-perempuan yang didatangkan dari Korea Selatan, Taiwan, Filipina, dan negara Asia Tenggara lainnya. Mengapa pihak Jepang kemudian tidak mendatangkan banyak perempuan dari Jepang, ini dikarenakan Jepang takut tentaranya akan kehilangan kepercayaan kepada negaranya dan juga militer Jepang jika mengetahui istri dan saudara perempuan mereka dijadikan pelacur di *Comfort Station*. Namun, beberapa wanita di dalam *Comfort Station* ada juga yang merupakan pelacur dari awalnya. Mereka setuju atas tawaran pihak militer Jepang untuk masuk ke dalam *Comfort Station* dengan timbal balik upah yang sepadan (Lee, 2003: 512).

Hilangnya sistem *Comfort Stations* di Jepang ternyata tidak menghilangkan secara betul konsep yang dipakai dalam *Comfort Stations* tersebut. Pada tahun 1946, *Supreme Commander for the Allied Powers* (SCAP) saat itu kemudian menghapus sistem prostitusi berlisensi di Jepang. *Red Light District* dan *Blue Light District* kemudian dibentuk oleh SCAP dalam hal menghilangkan prostitusi yang bebas. *Red Light District* dibentuk sebagai daerah yang memiliki izin untuk mendirikan bisnis berbasis industri seks seperti *Strip Club*, Teater Dewasa, dan lain-lain. Sedangkan *Blue Light District* dibentuk sebagai daerah yang illegal untuk mendirikan bisnis berbasis industri

seks. Polisi-polisi di Jepang kemudian menandai daerah-daerah di Jepang dengan tanda tersebut untuk melakukan penyisiran terhadap bisnis-bisnis ilegal yang berada di *Blue Light District*. Untuk mengatasi hal ini, banyak kemudian pihak-pihak di Jepang yang sudah menjalani prostitusi mengelabui bisnis mereka dengan titel “*Soapland*”, tempat pijatan, ataupun restoran (Lee, 2003: 515).

Pada tahun 1956, Pemerintah Jepang meloloskan *Anti-Prostitution Law* dan kemudian akhirnya benar-benar diimplementasikan pada tahun 1958. Hukum ini kemudian menghapus sistem *Red Light District* ataupun *Blue Light District* di Jepang, mengkriminalisasi segala tindakan *vaginal intercourse*<sup>2</sup> dengan tujuan komersialisasi. Tujuan hukum tersebut dibentuk adalah untuk mengakhiri prostitusi yang berlisensi, dan untuk melarang adanya promosi terkait dengan bisnis prostitusi tersebut. Bagaimanapun, *Anti Prostitution Law* tidak melarang prostitusi tetapi hanya berusaha untuk mencegahnya, melalui pendidikan dan rehabilitasi untuk para pelacur. Wanita di bawah hukum *Anti Prostitution Law* dikirim ke Rumah Bimbingan Perempuan, di mana mereka bisa mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan keadaan mereka menjadi lebih baik dari saat itu (law.e-gov.go.jp, 2016).

---

<sup>2</sup> *Vaginal Intercourse*, berhubungan badan, senggama.



Seiring dengan berkembangnya kasus ini maka kemudian banyak pertanyaan yang muncul seperti, Apakah prostitusi benar-benar ilegal di Jepang?

Prostitusi sebenarnya ilegal di Jepang. Namun, definisi prostitusi sangat terbatas kepada *coitus* (penis masuk ke vagina). Sementara *Anti Prostitution Law* juga tidak melarang prostitusi itu sendiri tetapi menghukum mereka yang mendapat keuntungan dari mengeksploitasi perempuan dalam bisnis prostitusi. Oleh karena itu, jika seseorang (yang tidak berada dalam naungan bisnis prostitusi) melakukan hubungan seks untuk uang atau komersialisasi, secara teknis hukum itu legal. Artinya, oral seks, anal seks, seks *intercrural*, dan segala tindakan apa pun yang merupakan tindakan *non-coital* adalah legal dan tidak dilarang menurut hukum tersebut. Banyak kota-kota di Jepang memiliki distrik lampu merah, di mana orang dapat menemukan berbagai layanan seksual yang berbeda. Semua bisnis tersebut sah menurut hukum asal tidak mengandung *coitus* dalam operasinya (www.lovetravellife.com, 2011).

Pasar seks komersial Jepang sangat beragam dan luas. Distrik lampu merah tersebar di Prefektur Tokyo termasuk Kabukicho, Ikebukuro, Roppongi dan Shibuya. Di Roppongi melayani pembeli asing yang tertarik dengan wanita Kaukasia dan Filipina untuk melayanani seks yang komersial. Di Nagano, memiliki wanita dan anak-anak di bawah umur dari Thailand. Lokasi klub seks di Shinjuku menyediakan akses mudah bagi pengusaha yang ingin berhubungan

seks sebelum atau setelah bekerja karena mereka memiliki tempat yang nyaman dan strategis dan berlokasi dekat stasiun kereta api dengan volume pengguna tertinggi di Tokyo. *Venue* seks memiliki rantai dengan atraksi komersial lainnya, termasuk teater terbesar di kota dan mal besar. Integrasi atraksi yang beragam ini adalah bukti bagaimana hal ini "normal" bagi masyarakat Jepang dan bagaimana budaya toleransi telah dikembangkan dan dipelihara (Share Hope International, 2007: 136).

*Fuzoku*, di Jepang, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan tempat prostitusi; bisnis yang mendukung industri seks atau toko-toko yang dijalankan oleh kejahatan terorganisir untuk menyediakan layanan seks komersial. *Soaplands*, salon pink, klub kencana, panti pijat, adalah beberapa dari banyak tempat yang terindikasi dalam bisnis seks komersial yang tersedia di Jepang. Daerah Kabukicho terletak di Shinjuku berisi hiburan campuran dan kegiatan yang menghilangkan potensi adanya stigma distrik lampu merah.

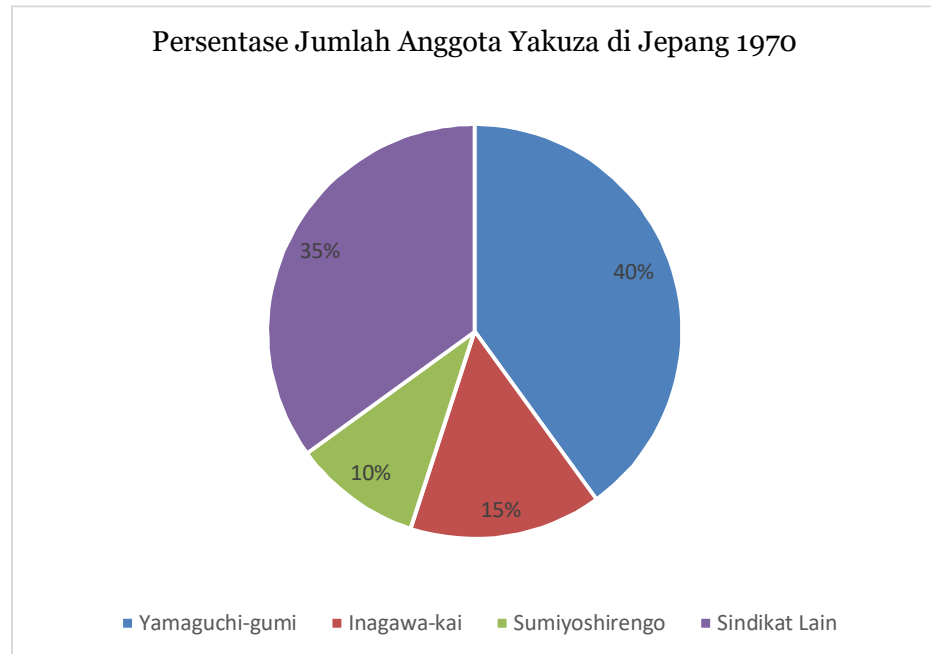
Menurut Statistik Nasional Badan Kepolisian Jepang, 923 orang ditangkap di bawah hukum *Anti Prostitution Law* di tahun 2006. Hal ini menunjukkan kecenderungan berkurang dari penangkapan di bawah hukum, turun dari 20.167 penangkapan pada tahun 1959, awal dari diberlakukannya hukum *Anti Prostitution Law* dan 10.000 penangkapan per tahun mulai tahun 1969 sampai pertengahan tahun 1980-an. Walaupun begitu, praktek *Sex Trafficking* ini kemudian berkembang pesat dengan tidak adanya regulasi

hukum yang jelas mengenai tindakan prostitusi di Jepang. *International Labour Organization* (ILO) saat itu menyatakan bahwa perdagangan manusia telah mempengaruhi hampir semua wilayah di Jepang. Diperkirakan perdagangan manusia di Jepang khususnya *Sex Trafficking* dan industri pornografi menyumbang sebesar 2,14% dari Produk Domestik Bruto (PDB) di negara-negara Asia Tenggara dan sekitar 1-3% dari PDB Jepang pada tahun 2009 (Pena, 2014: 62). Sejak tahun 1980-an industri seks ini menjadi salah satu bisnis yang paling menguntungkan untuk organisasi kriminal internasional utamanya bagi mereka yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar di Jepang: Yakuza.

## **2.2 Yakuza**

Pada puncak kekuasaan mereka pada tahun 1963, sindikat yakuza terdiri dari 184.109 anggota di 5216 geng bawahan. Sampai tahun 2008, di Jepang, ada sekitar 88.000 sampai 90.000 anggota di beberapa 3.300 geng terpisah. Dari jumlah ini, 75 persen adalah anggota dari enam belas sindikat yakuza yang ternama. Di Jepang sendiri, ada tiga sindikat besar yang mengontrol operasi di Jepang yaitu, Yamaguchi-gumi, Inagawa-kai, dan Sumiyoshi-Rengo, tercatat anggota mereka menyumbang 65 persen dari jumlah total anggota yakuza yang ada di Jepang (Gragert, 2010: 175-176).

Grafik 2.2 Persentase Jumlah Yakuza di Jepang tahun 1970



Sumber: Bruce Gragert, (2010) *Yakuza: The Warlord of Japanese Organized Crime*.

Yamaguchi-gumi adalah sindikat Yakuza yang terbesar dan paling kuat di Jepang. Diperkirakan pada tahun 2008, jumlah mereka mencapai 30.000 anggota di beberapa 944 geng di seluruh Jepang. Pengaruh Yamaguchi-gumi menyebar ke seluruh wilayah Jepang. Namun, markas utama mereka terletak di kota pelabuhan Kobe. Sebagian besar operasi mereka mengambil jalan dengan menggunakan tameng di belakang perusahaan terdepan mereka yang biasa disebut Association of Harbor Stevedoring Promotion (Kaplan, 2003: 75). Di sepanjang wilayah Jepang, mereka terlibat dalam pencucian uang, penyelundupan, pornografi, pemalsuan, pemerasan, prostitusi, perdagangan

budak seks, perjudian, dan mengontrol dari ribuan kios yang ada di Jepang. Selain itu, mereka terikat ke dalam bisnis olahraga profesional, seperti tinju dan gulat sumo.

Yamaguchi-gumi juga mengontrol banyak dari industri hiburan dari *talent agencies* hingga perusahaan film yang mereka dirikan sendiri. Namun sebagian besar dari pendapatan ilegal mereka berasal dari penjualan narkoba, terutama amfetamin. Yamaguchi-gumi juga memperoleh penghasilan dari sumber yang legal termasuk real estate, video game, lapangan golf, pembuangan limbah, jasa keamanan, restoran, bar, rumah sakit, sekolah bahasa Inggris, dan investasi luar negeri. Namun, sangat bisa dipastikan bahwa bisnis-bisnis tersebut dibeli atau dibangun dengan menggunakan uang "kotor" hasil kejahatan mereka dan bisnis ini kemudian menyuplai dana untuk operasi ilegal lainnya. Semua operasi Yamaguchi-Gumi, diperkirakan mengontrol sekitar 7.000 toko, 5.000 restoran, 4.500 operasi pencucian uang, 2.300 rumah spa, 2.500 bar, 600 perusahaan properti dan 400 perusahaan transportasi (Gragert, 2010: 175).

Selanjutnya ada Inagawa-kai, yang diestimasi terakhir pada tahun 1984, terdiri dari 4.347 anggota di 119 geng. Inagawa-kai memiliki kantor pusat yang terletak di Tokyo dan Yokohama, dan lingkup pengaruh mereka konsisten berada di wilayah timur Jepang. Sumber utama pendapatan bagi Inagawakai berasal dari kegiatan perjudian seperti taruhan, mengorganisir perjudian lepas

pantai, dan mengoperasikan taruhan tinggi di kasino dan permainan kartu. Mereka juga terlibat dalam kegiatan *Debt Collector* dan investasi luar negeri, pencucian uang, pengadaan senjata, pemerasan, prostitusi, perdagangan budak seks, dan narkoba. Menurut perkiraan Badan Nasional Statistik Jepang pada tahun 1979, Inagawa-kai juga mengoperasikan 879 bisnis yang legal, seperti perusahaan konstruksi dan hiburan, bar, tempat hiburan, lapangan golf, dan restoran (Gragert, 2010: 176).

Sindikata yakuza yang paling kuat selanjutnya adalah Sumiyoshi-rengo. Sumiyoshi-Rengo terdiri dari 6.723 anggota di 113 geng. Sumiyoshi-Rengo berkantor pusat di Tokyo, dan lingkup pengaruhnya meluas ke seluruh wilayah timur dari Jepang. Bisnis mereka mencakup kegiatan yang relatif konsisten dan sama dengan dari Inagawakai dan Yamaguchi-gumi (Gragert, 2010: 176).

Sejak tahun 1970-an, sindikat-sindikata Yakuza tersebut, secara khusus, telah memperluas operasi mereka di luar negeri. Misalnya, mereka sekarang memiliki operasi di: Amerika Selatan, Brasil, khususnya, Filipina, Thailand, Eropa, Rusia, Cina, Australia, Amerika Selatan, Taiwan, Korea; dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, misalnya, Yakuza terlibat dalam pencucian uang, pemerasan, prostitusi, penyelundupan senjata, penyelundupan narkoba, perjudian, menarik perempuan untuk perdagangan budak seks, dan real estate investasi. Selain itu, yakuza diyakini terkait dengan operasi penyelundupan yang diperkirakan memasok 90% dari metamfetamin kristal yang tersedia di

Hawaii. Selain itu, pihak berwenang telah melacak senilai \$500 juta aset di Amerika Serikat, dan, di Hawaii, saja, lebih dari 50 properti mulai dari klub golf hingga gedung perkantoran yang dimiliki oleh anggota yakuza (Gragert, 2010: 177).

Walaupun sindikat yakuza melaksanakan sebagian besar kegiatan kriminal mereka sendiri, mereka juga akan membentuk aliansi untuk mencegah perang sesama geng. Aliansi ini mungkin bersifat sementara dan hanya untuk satu tujuan, seperti penyelundupan narkoba, atau mereka mungkin secara relatif akan mempermanenkan kerjasama tersebut untuk beberapa kegiatan bisnis lainnya. Sindikat ini juga akan membentuk aliansi strategis dengan kelompok kejahatan terorganisir dari kelompok yang berbeda di luar negeri. Misalnya, Yakuza telah membentuk aliansi dengan Triad Hong Kong, Taiwan, dan Cina untuk tujuan perdagangan heroin, amfetamin, pekerja migran, dan perempuan dan anak-anak untuk perdagangan budak seks. Selain itu, yakuza telah membentuk ikatan dengan Mafia Rusia untuk tujuan penyelundupan senjata. Yang terakhir, yakuza telah menjalin hubungan dengan Mafia Amerika untuk tujuan penyelundupan senjata, perjudian, dan operasi koordinasi dan pembiayaan penyelundupan narkoba (Gragert, 2010: 177-178). Namun, aksi Yakuza ini sangat terlihat pada operasi mereka terkait prostitusi dan *Sex Trafficking* di Jepang yang memang memiliki angka yang sangat tinggi dan diduga Yakuza menjadi salah satu faktor yang memperlancar operasi ini.

### 2.3 Yakuza dan *Sex Trafficking*

Yakuza diyakini memainkan peran penting dalam *Sex Trafficking* di Jepang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak bisnis di perdagangan manusia yang dimiliki, dikuasai, atau dikenakan pajak oleh Yakuza (humantrafficking.org, 2015). Yakuza telah terlibat dalam bisnis internasional sejak akhir 1960-an. Sekitar waktu ini, industri pariwisata di Jepang tumbuh sebagai kekuatan baru bagi Jepang dan warga Jepang telah meningkatkan jumlah pemakaian uang tunai mereka (Kaplan, 2003, 76).

Sebelum berlakunya *Anti-Prostitution Law* di Jepang, untuk waktu yang lama dalam sejarah Jepang, legislator telah mendorong sistem prostitusi legal berdasarkan lisensi. Hal ini terjadi tidak hanya untuk menjaga ketertiban umum tetapi juga untuk menjaga populasi di Jepang sendiri; karena selama ini pemerintah Jepang meyakini prostitusi sendiri menambah angka populasi di Jepang. Sampai tahun 1956, bisnis prostitusi ini tidak dikontrol langsung oleh Yakuza. Ini tidak berarti bahwa kegiatan tersebut tidak membutuhkan jasa keamanan yang disediakan oleh Yakuza. Hukum *Anti Prostitution Law* di Jepang dipandang sebagai *kago-ho* (hukum bambu), atau hukum yang penuh lubang. Pasal 2 Undang-Undang *Anti Prostitution Law* tahun 1956 mendefinisikan prostitusi sebagai "tindakan seksual dengan imbalan



kompensasi atau janji imbalan." Ini berarti bahwa layanan lain yang tidak termasuk aktivitas seksual yang terindikasi terdapat penetrasi vagina tidak tercakup oleh hukum ini. Akibatnya, prostitusi di Jepang telah berkembang luas ke dalam industri yang didedikasikan untuk layanan seksual. Banyak dari pengusaha bisnis prostitusi di Jepang ini sendiri yang mengelabui otoritas di Jepang dengan menggunakan nama "*Soaplant*", Spa, panti pijat, bahkan pusat dan toko-toko kecantikan menawarkan layanan pijat yang mengandung unsur seksual. Hal ini membuat Yakuza tidak hanya menyediakan jasa keamanan saja tetapi juga ikut berkecimpung dalam industri ini (Adelstein, 2012: 32).

Kemudian ledakan industri pariwisata pun terjadi Jepang pada akhir tahun 1960-an, berkat mata uang yen yang makin menguat, memungkinkan banyak orang Jepang untuk melakukan perjalanan yang belum pernah dilakukan secara massif sebelumnya dalam sejarah mereka. Beberapa wisatawan melihat pariwisata sebagai sarana untuk membangun jembatan lintas budaya. Tetapi banyak orang Jepang mulai mengatur perjalanan untuk tujuan seksual dan mengambil peluang dalam bisnis ini dari negara lain. Yakuza langsung bertanggung jawab terhadap industri ini untuk mengembangkan industry ini. Taipei, Seoul, Manila dan Bangkok mulai dikunjungi oleh Yakuza. Dari daerah tersebut, perempuan-perempuan "diimpor" untuk dipekerjakan di prostitusi jalanan dan banyak dari mereka yang merupakan warga keturunan Cina. Diperkirakan saat ini ada sedikitnya 100.000 orang asing yang terlibat

dalam prostitusi di Jepang, bisnis yang menguntungkan jika Anda menganggap bahwa kinerja seksual dengan pelacur di Jepang biaya minimal 300 Euro dan kemudian, melakukan perhitungan pada 100.000 pelacur asing, omset kira-kira 7,3 miliar Euro. Dengan asumsi maka itu seorang pelacur diberi harga sebesar 300 dollar Amerika dari negara asalnya dan setelah tiba di Jepang dapat dijual sekitar 30.000 Euro, keuntungan yakuza dari bisnis semacam ini ternyata sangat tinggi (Adelstein, 2012: 32).

Tabel 2.1 Jumlah perjalanan turis ke Jepang tahun 1979

Perjalanan Turis ke Jepang, 1979			
Negara	Turis	Pria	Wanita
Korea Selatan	525,326	93.7%	6.3%
Taiwan	618,538	91.4%	8.6%
Filipina	190,637	83.7%	16.3%
Thailand	80,140	78.9%	21.2%
Amerika Serikat	1,410,320	59.4%	40.6%
Prancis	166,622	50.5%	49.5%

Sumber: Biro Imigrasi, Menteri Kehakiman Jepang, 2000.

Peningkatan pariwisata, bagaimanapun, tidak hanya soal bepergian ke luar negeri, tetapi juga bagaimana dengan kualitas dalam negeri. Hal ini pulalah yang dimanfaatkan oleh Yakuza saat itu. Menyadari besarnya peluang dalam kepariwisataan, Yakuza banyak mengoperasikan kegiatan bisnis mereka dengan menjual beberapa perempuan Jepang. Turis asing akan

melakukan perjalanan ke rumah bordil di Jepang di mana Yakuza akan memperkenalkan mereka kepada mucikari lokal atau membawa mereka ke klub lokal, yang dibiayai oleh Yakuza.

"Tur seks" di Jepang pun lahir. Tur seks Jepang mendorong Yakuza untuk mengikuti trend dari tetangga mereka di Asia Timur. Tur seks ini memperkenalkan Yakuza di arena perdagangan internasional dalam *Sex Trafficking*. Ini adalah perdagangan yang melibatkan ratusan ribu perempuan dari negara-negara lain yang sebagian besar miskin dan masih anak-anak, dan kemudian memaksa mereka menjadi pelacur di Jepang dan di luar negeri. Aktivitas industri seks di Jepang dalam skala internasional terkait perdagangan wanita meliputi banyak kasus seperti tur seks, prostitusi di sekitar pangkalan militer, perdagangan perempuan dan anak-anak, pernikahan palsu, dan pornografi. Yakuza memiliki peran di hampir semua kasus tersebut, dibantu oleh organisasi kejahatan internasional di negara-negara miskin kawasan Asia. *Traffickers* menyediakan perempuan dari desa-desa kecil ke rumah bordil di distrik yang sedang berkembang dengan operasi tersebut. Karena pemerintah pusat Jepang memantau pergerakan mereka, ratusan broker mengambil anak perempuan dari tempat ke tempat dan memperdagangkan mereka dengan sangat berhati-hati. Tur Seks yang saat itu menjadi fenomena di Jepang, membuat *Sex Trafficking* dan Yakuza telah mencapai tahap baru, yaitu menciptakan pusat industri skala besar dari

prostitusi. Banyak dari prostitusi yang terletak hanya empat sampai lima jam dari pusat kota Tokyo (Kaplan, 2003: 233).

Berbeda dengan negara-negara lain, kunci dari industri seks komersial di Jepang adalah sindikat kejahatan yang terorganisir yaitu Yakuza. Mereka berada di banyak segmen masyarakat Jepang, termasuk bisnis, politik, dan penegakan hukum, melalui intimidasi dan pemaksaan. Yakuza, pada dasarnya, memaksa warga Jepang untuk menerima budaya toleransi untuk ada di negara mereka.

Yakuza awalnya tidak menciptakan kondisi prostitusi sebesar demikian, juga tidak mengontrol sebagian besar operasi lokal. Operasi tersebut ditangani oleh berbagai preman bawahan di Jepang, mucikari, dan orang-orang yang berada bisnis tersebut. Namun Yakuza melakukan memainkan peran kunci dalam perdagangan dalam beberapa cara. Mereka menyediakan jasa untuk menemani tur seks, menyiapkan kontak dengan mucikari lokal, memberikan perlindungan politik, dan membimbing rekan mereka di Jepang ke sumber perempuan, obat-obatan, atau apapun yang mereka inginkan. Dalam banyak kasus, mereka telah membiayai klub, terutama yang melayani orang-orang Jepang. Pada 1980-an, Jepang adalah salah satu negara utama pengimpor perempuan asing khususnya yang bekerja sebagai pekerja seks. Yakuza dengan cepat menembus pasar ini dan Yakuza mengontrol hampir seluruh operasi *Sex Trafficking* di Jepang, Asia Tenggara, Rusia, Polandia dan

yang terbaru adalah Kolombia dan Indonesia. Ketika Yakuza tidak terlibat langsung dalam operasinya, mereka masih membiayai perempuan jalanan untuk bekerja di wilayah mereka, yang dikenal sebagai *shobadai*. (Maria, 2014: 4-6).

Goto-gumi, yang merupakan kelompok bawahan Yamaguchi-gumi, diduga menjadi salah satu penyalur utama perempuan dari kegiatan *Sex Trafficking*. Goto-gumi, memiliki kehadiran yang kuat di Jepang barat, yang di mana sekarang mulai bergerak ke timur Jepang (Kanto) dengan pesat, terutama karena adanya Yamaguchi-gumi. Goto-gumi terdiri dari 22 unit geng yang lebih kecil (*sanji danata*) dengan sekitar 450-550 anggota. Jika *kigyoshatei* (saudara korporasi; pengusaha yang berafiliasi dengan kelompok Yakuza) dimasukkan, jumlah ini bisa mencapai 900 anggota. Goto-gumi memiliki kantor di Nagano, Akita, Yamagata, Iwate, Miyagi, Saitama, Ibaragi, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, dan prefektur Ishikawa, dengan markas besar di Shizuoka dan Tokyo (Share Hope International, 2007: 132).

Yakuza tidak hanya mengimpor perempuan ke Jepang untuk tujuan seks komersial, tetapi juga mengimpor banyak orang berbadan besar dan berkulit hitam. Shared Hope International mencatat bahwa, laki-laki Afrika khususnya, didakwa dengan mengelola klub dan menjadi *bodyguard* untuk bisnis prostitusi di mana perempuan asing dilacurkan dalam klub-klub di Jepang. Beberapa orang berspekulasi bahwa Yakuza menggunakan laki-laki

Afrika tersebut untuk mengelola perempuan asing dan membuat mereka kambing hitam dalam hal penindakan hukum oleh pihak berwenang dari pelanggaran peraturan yang melarang perempuan asing bekerja sebagai hostes dalam sebuah klub. Orang-orang Afrika ini dilatih oleh Yakuza untuk bisa berbahasa Inggris dan Bahasa Jepang dengan tujuan untuk berkomunikasi dengan beberapa wanita asing.

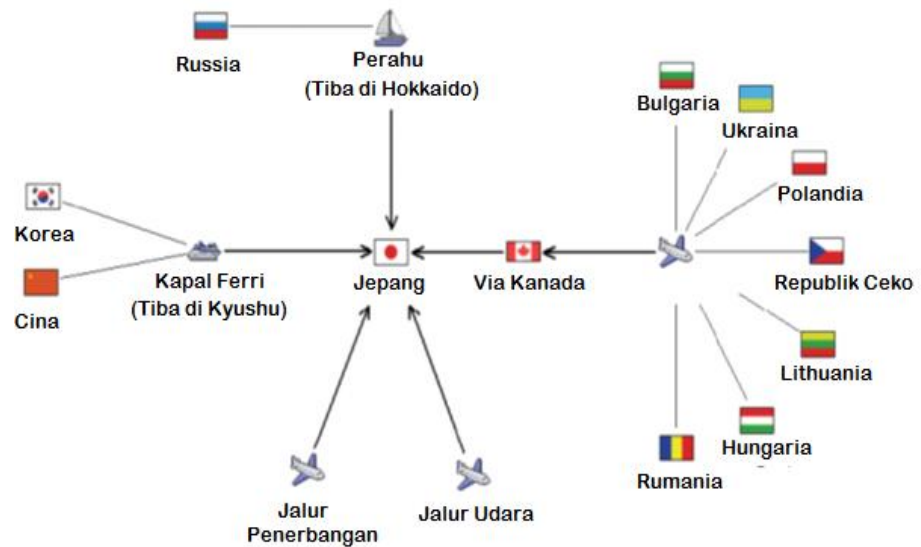
Yakuza, telah disebutkan sebelumnya juga memiliki beberapa afiliasi di negara-negara lain dan melakukan infiltrasi di sana. Contoh infiltrasi Yakuza ke dalam bisnis *Sex Trafficking* adalah kasus di Maladewa yang didalangi oleh dua *trafficker* yang diduga beroperasi dari Distrik Roppongi Tokyo. Dikatakan bahwa salah satu dari mereka memiliki properti di Maladewa dan mengatur kapal pesiar yang bertujuan untuk seks komersial bagi pengusaha Jepang dan warga negara asing. Di Maladewa, seorang wanita dikabarkan bisa mendapatkan \$200 per hari untuk layanan seksual yang terbatas, yang di mana kegiatan tersebut menjaring banyak uang untuk penyelenggara. WNA dilaporkan menikah dengan seorang wanita Jepang, yang menyediakan dia statusnya untuk melakukan bisnis di Jepang. (Share Hope International, 2007: 132)

Aksi Yakuza tersebut dibantu oleh beberapa afiliasi Yakuza yang berada di garis terdepan dalam pengoperasian *Sex Trafficking* di Jepang:

## 1. Kokusai Kogyo 21

Kokusai Kogyo 21 (KK21) adalah nama dari korporasi terdepan dengan tugas mengimpor perempuan dari luar negeri ke Jepang sebagai pekerja seks untuk Goto-gumi dan beberapa sindikat Yakuza lain di distrik Roppongi, Tokyo. KK21 merekrut perempuan dari negara-negara asing melalui internet dan memiliki kantor di Amerika Selatan, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Shizuoka di Tokyo. Perusahaan ini didirikan oleh Goto Tadamasu, pimpinan dari Goto-gumi. Sebenarnya KK21 secara sah terdaftar sebagai organisasi non-profit yang kegiatan utamanya adalah untuk memberikan layanan konsultasi bagi para pekerja asing legal di Jepang. Namun, pada kenyataannya, KK21 merekrut dan perdagangan perempuan ke Jepang dari Rumania, Malaysia, Indonesia, Filipina, Brazil, dan Vietnam. Karena didirikan pada tahun 2000, KK21 tidak terpengaruh oleh perubahan terbaru pada undang-undang *entertainment visa* yang hanya berlaku untuk lembaga yang baru didirikan. (Share Hope International, 2007: 132)

Gambar 2.2 Rute Traffickers dalam operasi *Sex Trafficking* di Jepang



Sumber: Shared Hope International, *DEMAND. A Comparative Examination of Sex Tourism and Trafficking in Jamaica, Japan, the Netherlands, and the United States*, 2007: 128.

KK21 dilaporkan bekerja dengan 50 *trafficker* di berbagai negara lain yang membawa perempuan ke Jepang untuk bekerja di 150 pub, panti pijat, rumah bordil, dan "Strip Club" di daerah Jepang barat. KK21 sendiri dilaporkan memiliki jasa perusahaan yang diiklankan di situsnya: [www.npokokusaikogyo21.jp](http://www.npokokusaikogyo21.jp), tetapi situs tersebut tidak bisa secara mudah diakses. Pada Januari 2006, situs web ini menawarkan layanan dari 121 perempuan Rumania, 80 perempuan Filipina, dan 40 perempuan Vietnam. KK21 dilaporkan berpenghasilan sampai jutaan dolar per tahun dalam bisnis *Sex Trafficking*, yang sebagian besar disalurkan kembali utamanya



ke Yamaguchi-gumi dan Goto-gumi yang kemudian melakukan *money laundering* melalui serikat investor di Jepang (*Toshikumiai*) dan perusahaan sekuritas, seperti *Shoken* (Share Hope International, 2007: 133).

## 2. Zengeiren

Zengeiren (*All-Japan Association of Business*) adalah sebuah kelompok lobi untuk Yakuza untuk lebih dari 400 bisnis yang terlibat dalam merekrut dan mempekerjakan wanita asing di Jepang. Zengeiren menyediakan akses ke pejabat politik di Partai Demokrat Liberal (LDP) di Jepang. Beberapa sumber melaporkan bahwa Zengeiren bekerja sebagai penghubung antara trafficker KK21 dan LDP. Bersama-sama, Zengeiren dan LDP telah menekan otoritas imigrasi di Jepang untuk menahan diri dalam menyelidiki perusahaan tertentu dan menginvestigasi klub tertentu. Tingkat korupsi politik dan kegiatan kriminal yang terlibat dalam perdagangan seks jelas dalam laporan berikut oleh wartawan di Tokyo:

“Zengeiren adalah tujuan tepat untuk bisnis *Human Trafficking* yang ada di Jepang. Jika Anda membutuhkan wanita jenis tertentu, Ukraina, Rusia, Hungaria, apa pun-Anda dapat pergi ke mereka dan mereka akan membantu Anda mengatur biayanya. Mereka memiliki koneksi

Yamaguchi-gumi, tetapi cobalah untuk tetap berhati-hati karena mereka berada di tengah-tengah wilayah Inagawakai. Tahun lalu di Tokushima-ken, salah satu anggota Zengeiren ditangkap karena perdagangan perempuan Rumania ke prostitusi. Jika ada orang yang benar-benar mengambil baik melihat anggota dewan mereka, itu akan menjadi jelas berapa banyak dari depan massa mereka sebenarnya. Tampaknya tidak ada orang di pemerintah benar-benar peduli, meskipun. Anda akan berpikir bahwa LDP akan berhenti membiarkan mereka mengadakan pertemuan di markas LDP tapi kemudian mereka (LDP) akan kehilangan banyak pintu belakang kontribusi politik. Zengeiren sangat berhati-hati menjaga anggota yakuza diketahui dari dewan direksi. Mereka menyadari bahwa mereka berada dalam situasi genting.”

Para pendukung utama tersisa dari Zengeiren adalah politisi *Upper House* Takeaki Kashimura, politisi *Lower House* Okiharu Yasuoka (mantan Menteri Kehakiman) dan direktur LDP Taki Yamazaki (Shared Hope International, 2007: 133).”

### 3. Keiyukai

Keiyukai adalah organisasi non-profit di Jepang yang dijalankan terutama oleh petugas polisi yang sudah pensiun. Kelompok ini memiliki ikatan yang kuat untuk setidaknya satu perusahaan yang diduga terlibat dalam *Sex Trafficking*. Sebenarnya, Keiyukai bekerja untuk instansi pemerintah dengan menyelidiki dan memantau organisasi swasta, perusahaan, dan individu yang menerima izin operasi bisnis. Menurut seorang reporter polisi veteran dari Asahi Shinbun:

“Keiyukai adalah lubang hitam dalam dunia polisi. Para detektif dan pensiunan tingkat rendah dari Biro Pencegahan Kejahatan (*Seikatsuanzenbu*) bergabung dengan organisasi ini ketika mereka meninggalkan kepolisian. Kelompok ini didanai oleh kelompok lobi sayap kanan dan juga sangat terhubung ke *Chosensoren* (organisasi yang mengelola perempuan korea di Jepang). Dikabarkan selama dua tahun terakhir perempuan Korea Utara sedang banyak diperdagangkan di Jepang dan Keiyukai mungkin memberikan perlindungan bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan ini.

Keiyukai yang beranggotakan pensiunan polisi yang seharusnya belum keluar, sering berhadapan dengan polisi di Jepang sehingga Anda dapat melihat konflik kepentingan yang muncul. Kelompok ini sangat kuat dan tidak ada koran di sini akan pernah berani untuk menulis sesuatu yang negatif tentang mereka (Shared Hope International, 2007: 134).”